I.7. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA DAN BANGUNAN GEDUNG KHUSUS EKSISTING

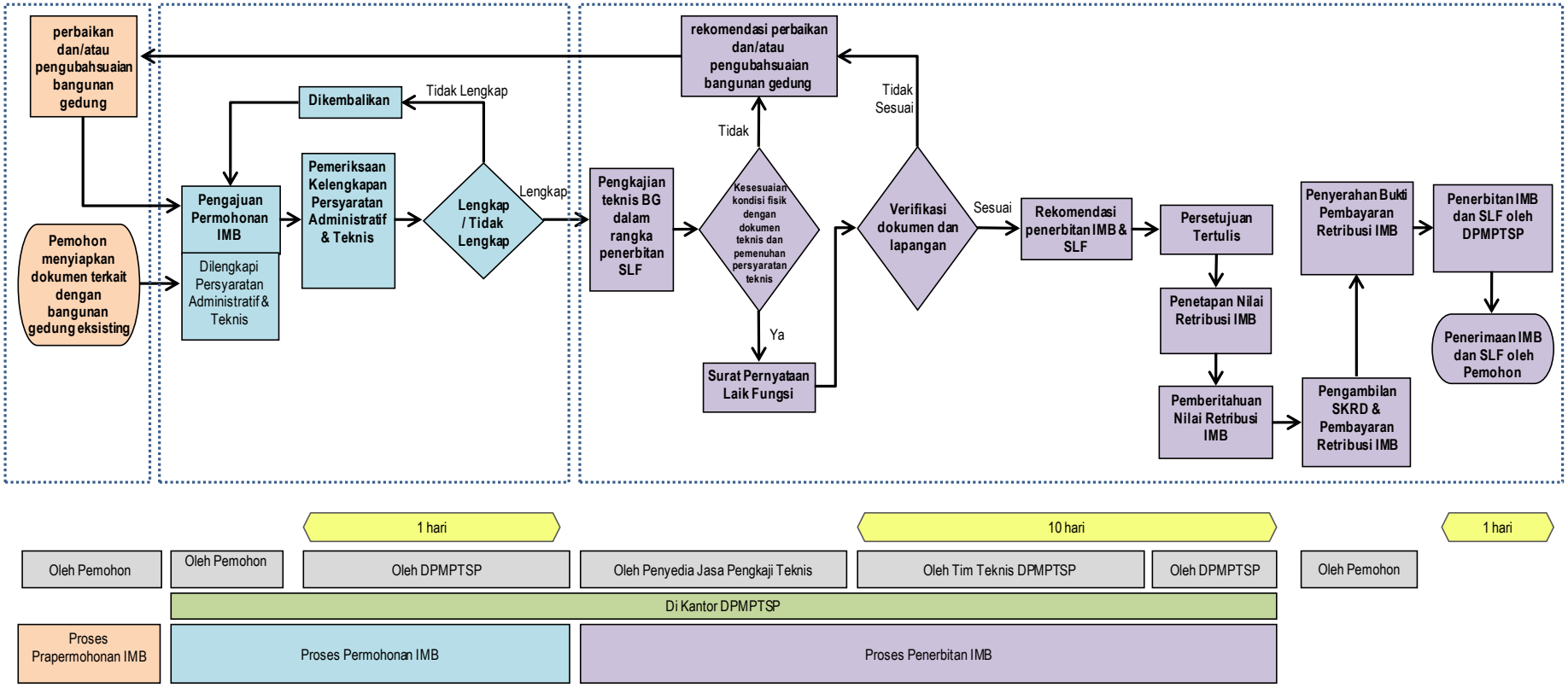

I.8 BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB UNTUK MENGUBAH, MEMPERLUAS, MENGURANGI, DAN/ATAU MERAWAT BANGUNAN GEDUNG BUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

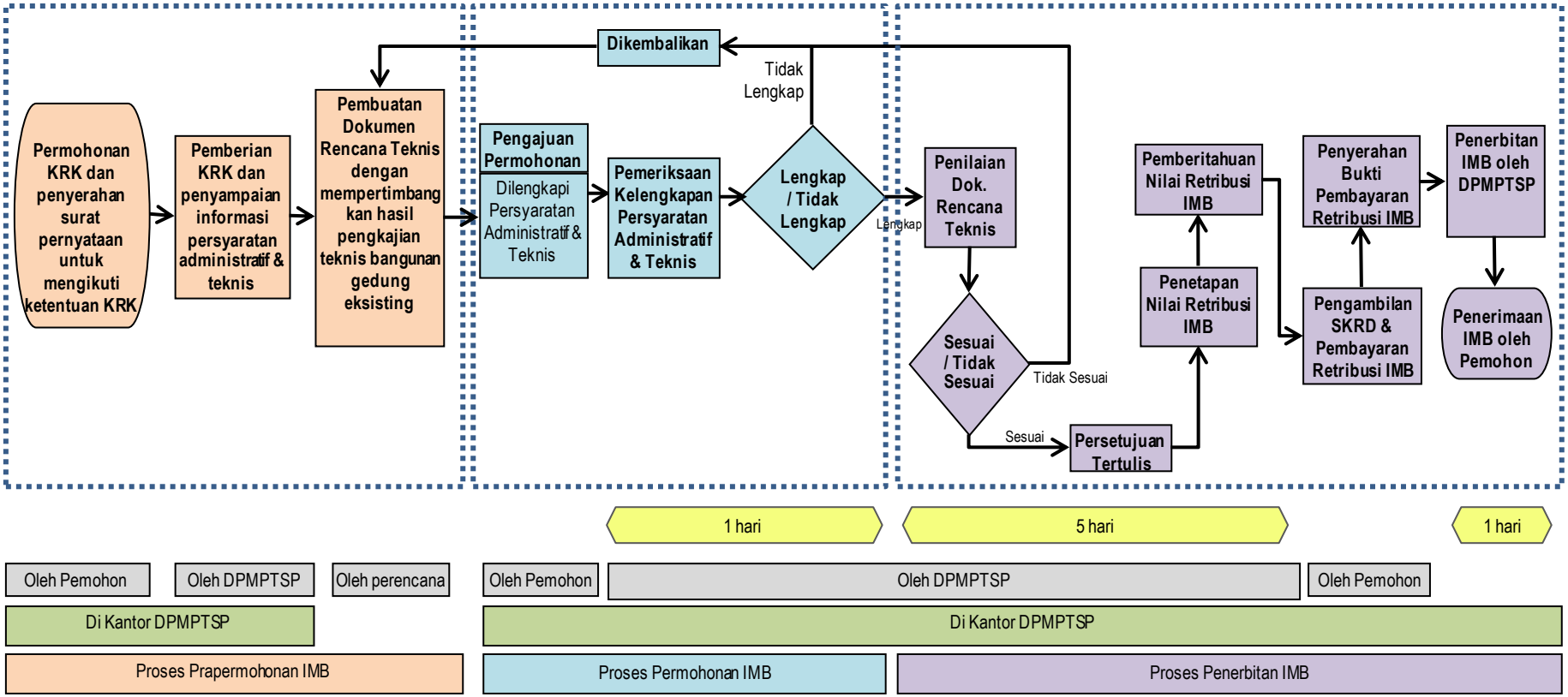

I.9. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB UNTUK MENGUBAH, MEMPERLUAS, MENGURANGI, DAN/ATAU MERAWAT BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN UMUM

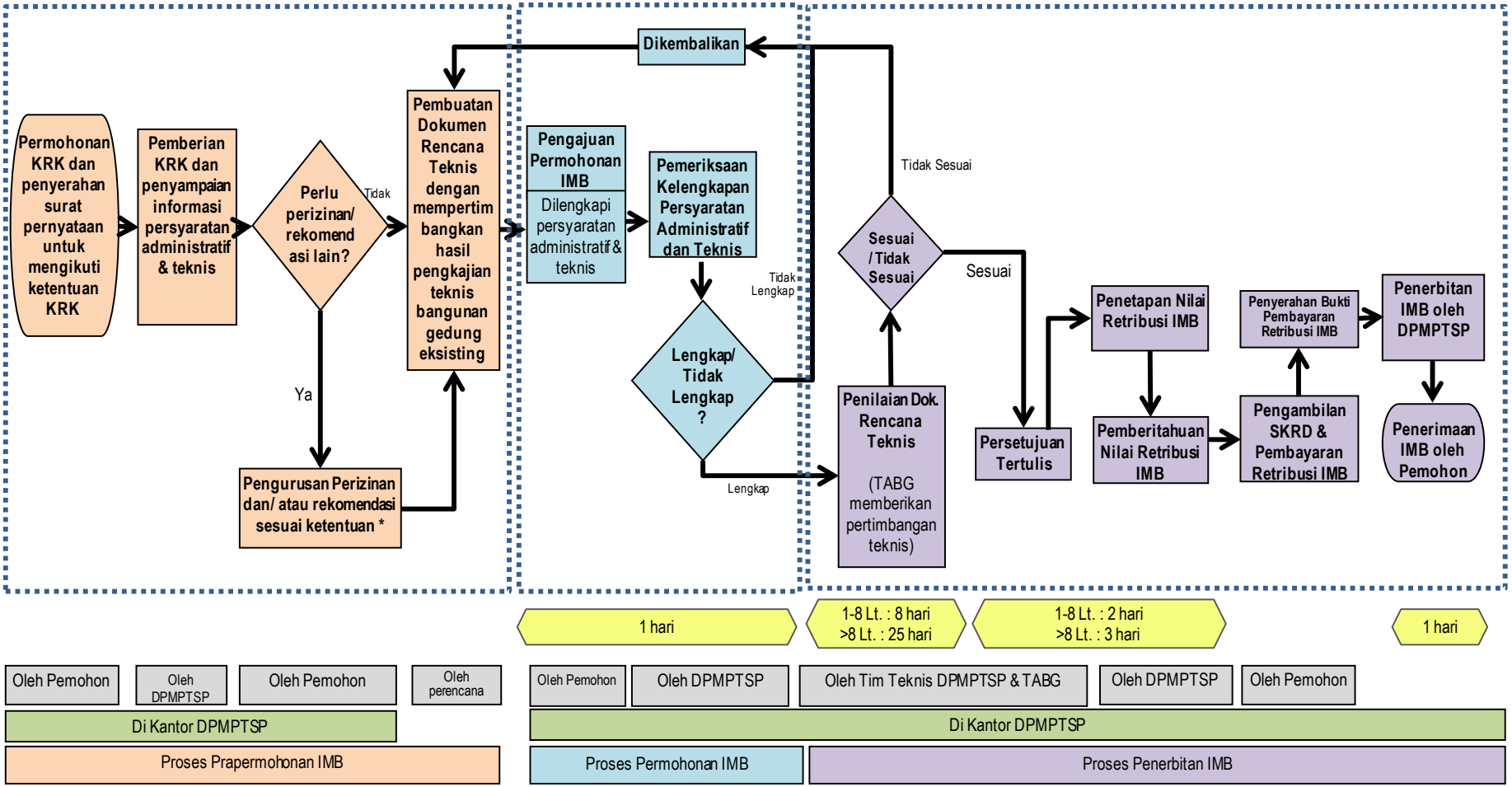

I.10. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BERTAHAP

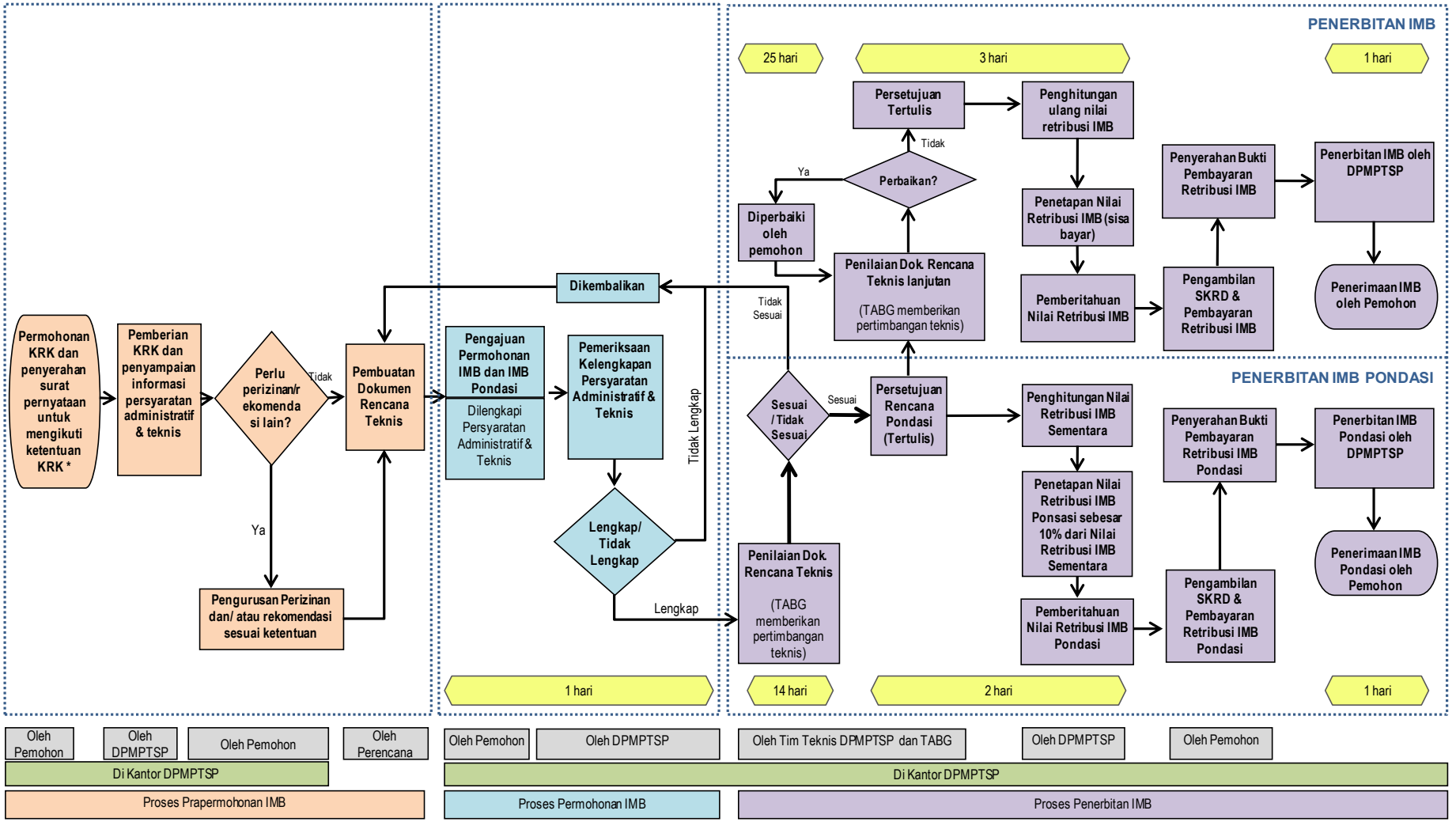

I.11. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG BUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SECARA KOLEKTIF

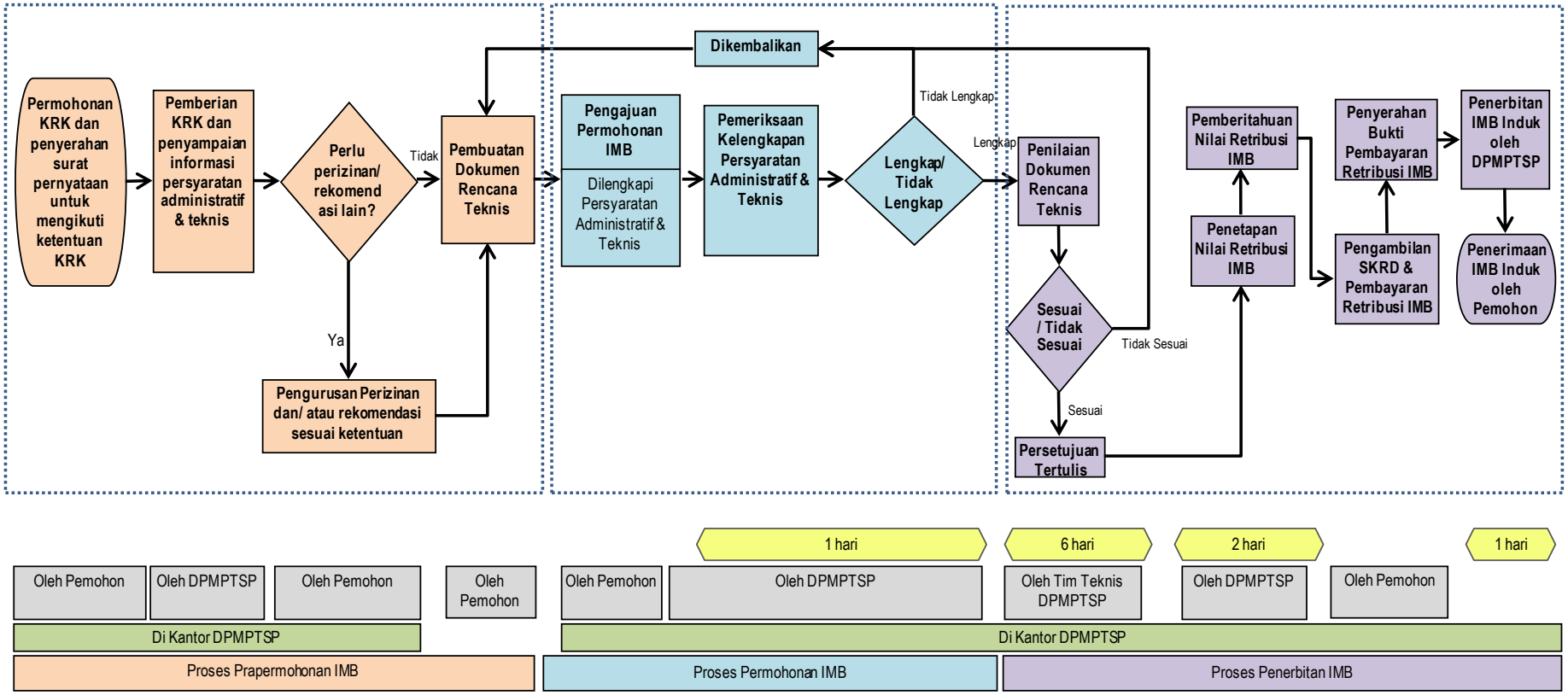

I.12. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN UMUM SECARA KOLEKTIF

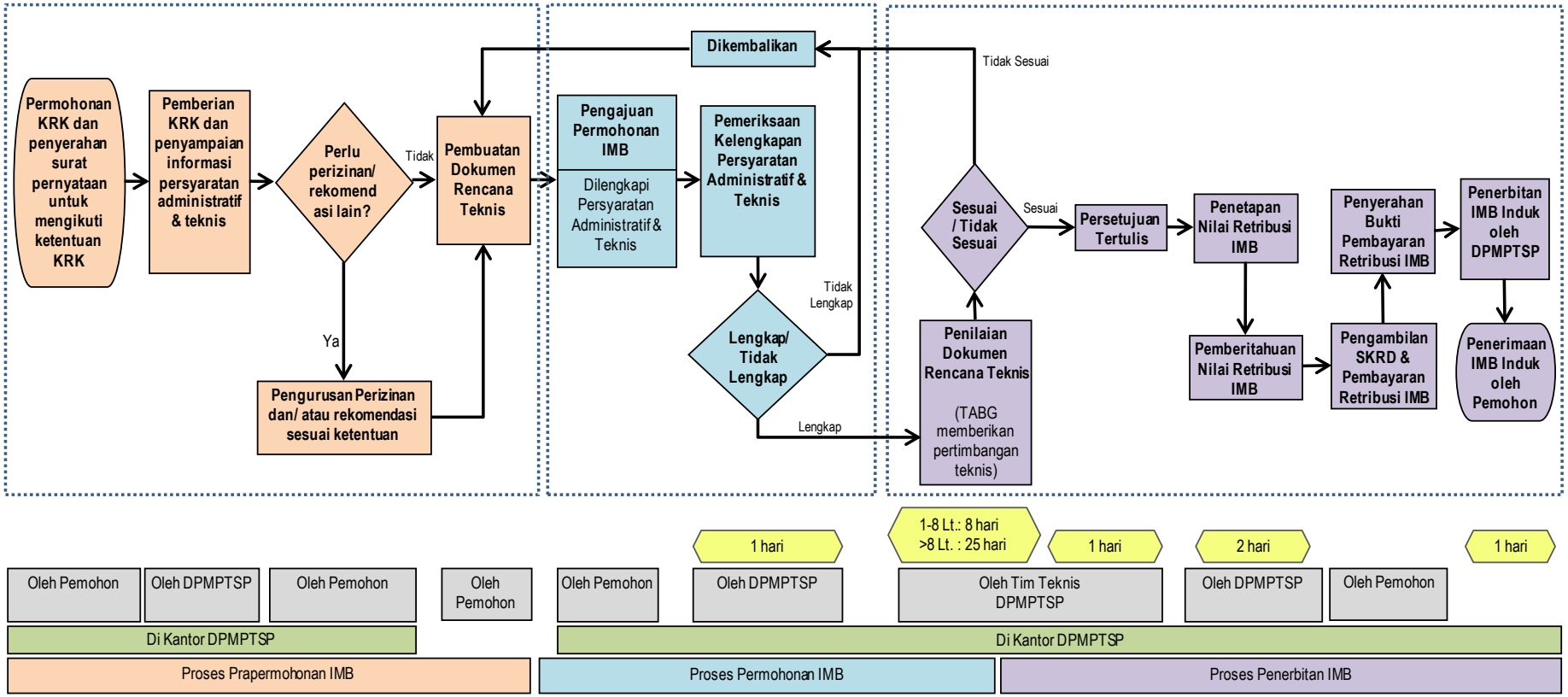

I.13. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN PRASARANA

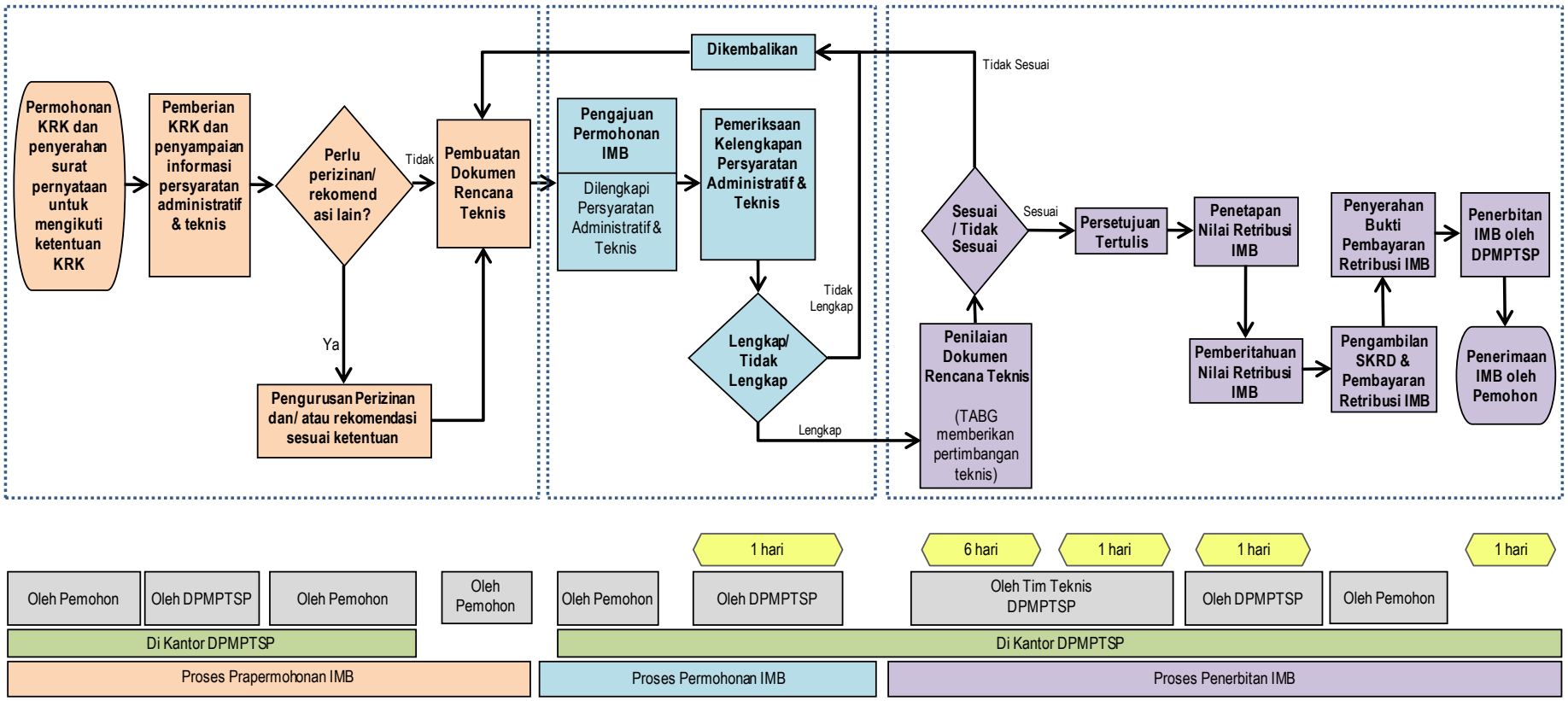

Bagian - J

FORMAT DOKUMEN IMB

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN/KOTA.....

NOMOR .....

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Membaca : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung

Nomor	:	..... tanggal .....
Nama pemohon / pemilik bangunan gedung	:	.....
Alamat	:	.....
untuk	:	Membangun baru/ mengubah/ memperluas/ mengurangi/ merawat bangunan gedung
Fungsi bangunan gedung	:	.....
Jenis bangunan gedung	:	.....
Nama bangunan gedung	:	.....
Luas bangunan gedung	:	.....
Di atas tanah	:	(hak atas tanah)
Luas tanah	:	.....
Atas nama/Pemilik tanah	:	.....
Terletak di	:	.....

Menimbang : Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang dimaksud dapat diberikan izin dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
5. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ..... Nomor ..... Tahun..... tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.....Nomor..... Tahun.....tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Keputusan Bupati/Walikota..... Nomor.....Tahun..... tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas ..... (instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung).
8. Rencana Tata Ruang Wilayah / Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan ..... ; dan
9. (Lain-lain) .....

Memperhatikan : Pertimbangan dari :

1. Instansi teknis pembina tata ruang/tata kota Nomor.....tanggal.....
2. Instansi teknis pembina pertanahan Nomor.....tanggal.....
3. Pejabat Pembuat Akte Tanah Nomor.....tanggal.....
4. Instansi terkait lainnya Nomor.....tanggal.....
5. Hasil dengar pendapat publik, tanggal.....
6. Pertimbangan teknis Tim Ahli Bangunan Gedung Nomor.....tanggal.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung kepada :

Nama pemohon :

Atas nama pemilik bangunan gedung :

Alamat :

Untuk : Membangun baru/ mengubah/ menambah/ mengurangi/ merawat bangunan gedung, sebagaimana dijelaskan dalam gambar situasi Lampiran b dan rencana teknis, meliputi gambar arsitektur, gambar konstruksi bangunan gedung, dan gambar utilitas (mekanikal dan elektrikal), pembekuan dan pencabutan IMB Lampiran c, dan penghitungan besarnya retribusi IMB Lampiran d Keputusan ini;

2. Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Lampiran d. Keputusan ini sebesar :
   a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung. Rp.....
   b. Retribusi administrasi IMB. *) Rp.....

c. Retribusi penyediaan formulir. Rp..... +

Jumlah ..... Rp.....

(Terbilang .....)

*) Untuk perubahan IMB atas permintaan pemilik.

3. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
4. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
5. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

DITETAPKAN DI :

PADA TANGGAL :

KEPALA DPMPTSP KABUPATEN/KOTA.....

.....

NIP.....

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1.....

2.....

3.....

(Contoh)

Lampiran a

Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota
Provinsi/Kabupaten/Kota.....
Nomor ..... Tanggal.....

FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

Fungsi bangunan gedung : *SOSIAL DAN BUDAYA*
Jenis bangunan gedung : *RUMAH SAKIT*
Nama bangunan gedung : *RUMAH SAKIT TULANG HOLIHOLI*
Atas nama/Pemilik : *YAYASAN HIRASHIPAS*

		Indeks
1000	**BANGUNAN GEDUNG**	
1100	**LINGKUP PEMBANGUNAN**	
1110	**Pembangunan baru**	**1,00**
1200	**FUNGSI**	
1240	Sosial dan Budaya / Rumah Sakit	1,00
1300	**KLASIFIKASI**	
1310	**Kompleksitas**	**0,25**
1313	Khusus	1,00
1320	**Permanensi**	**0,20**
1323	Permanen	1,00
1330	**Risiko kebakaran**	**0,15**
1332	Sedang	0,70
1340	**Zonasi gempa**	**0,15**
1343	Zona III / sedang	0,70
1350	**Lokasi (kepadatan bangunan gedung)**	**0,10**
1352	Sedang	0,70
1360	**Ketinggian bangunan gedung**	**0,10**
1362	Sedang	0,70
1370	**Kepemilikan**	**0,05**
1373	Badan Usaha	1,00
1400	**WAKTU PENGGUNAAN**	
1430	Tetap	1,00

CATATAN : Lampiran a ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur/Bupati/ Walikota Nomor : .....tanggal.....tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

Lampiran b
Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota/Provinsi/Kabupaten/Kota.....
Nomor ..... Tanggal.....

GAMBAR SITUASI

PETA SITUASI SKALA 1: 1000

RT/RK/RW	:	PERMOHONAN DARI	:
KELURAHAN/DESA	:	LOKASI	:
KECAMATAN	:	LUAS TANAH	:
KABUPATEN/KOTA	:	NOMOR/STATUS HAK ATAS TANAH	:

NOMOR BERKAS :
LOKASI YANG DIRENCANAKAN

PETA IKHTISAR SKALA 1 : 20.000

LOGO PEMDA

INSTANSI TEKNIS PEMBINA TATA RUANG / TATAKOTA
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA .....

CATATAN : Lampiran b ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur/Bupati/ Walikota Nomor : ..... tanggal ..... tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

Lampiran c
Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota.....
Nomor ..... Tanggal.....

PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

1. Syarat-syarat.

a. IMB dibekukan jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak peringatan ketiga atas pelanggaran, pemilik bangunan gedung tidak melakukan perbaikan.

b. IMB dicabut jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak dikenakan sanksi atas pelanggaran, pemilik bangunan gedung tidak melakukan perbaikan dan/atau penyelesaian atas sanksi yang dikenakan.

2. Catatan Perkembangan IMB.

a. Dibekukan pada tanggal :

b. Dicabut pada tanggal :

c. Dipecahkan pada tanggal :

d. Lain-lain :

DITETAPKAN DI :
PADA TANGGAL :
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

atau

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1.....
2.....
3.....

DITETAPKAN DI :
PADA TANGGAL :
A.N. GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....
KEPALA DINAS .....

NIP.....

CATATAN : Lampiran c ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur/Bupati/ Walikota Nomor : ..... tanggal.....tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung

(Contoh)
Lampiran d
Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota.....
Nomor ..... Tanggal.....

PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

Fungsi bangunan gedung : *SOSIAL DAN BUDAYA*
Jenis bangunan gedung : *RUMAH SAKIT*
Nama bangunan gedung : *RUMAH SAKIT TULANG HOLIHOLI*
Atas nama/Pemilik : *YAYASAN HIRASHIPAS*

1. INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI

   a. Daftar Indeks bangunan gedung yang dimaksud.

1000	**BANGUNAN GEDUNG**		**2000**	**PRASARANA BANGUNAN GEDUNG**	
1100	**LINGKUP PEMBANGUNAN**		**2100**	**LINGKUP PEMBANGUNAN**	
1110	**Pembangunan Baru**	**1,00**	**2110**	**Pembangunan baru**	**1,00**
1200	**FUNGSI**		**2210**	**Konstruksi pembatas**	
1240	Sosial dan Budaya / Rumah Sakit	**1,00**	221.*	Turap	
1300	**KLASIFIKASI**		**2220**	**Konstruksi penanda masuk**	
1310	**Kompleksitas**	**0,25**	222.*	Gerbang	1,00
1313	Khusus	1,00	**2230**	**Konstruksi perkerasan**	
1320	**Permanensi**	**0,20**	223.*	Parkir dan jalan	1,00
1323	Permanen	1,00	**2240**	**Konstruksi penghubung**	
1330	**Risiko kebakaran**	**0,15**	224.*	*Box culvert*	1,00
1332	Sedang	0,70	**2250**	**Konstruksi kolam/*reservoir* bawah tanah**	
1340	**Zonasi gempa**	**0,15**	225.*	*Waste water treatment plant*	1,00
1343	Zona V / Kuat	0,70	**2260**	**Konstruksi menara**	
1350	**Lokasi (kepadatan bangunan gedung)**	**0,10**	226.*	*Water tower*	1,00
			2290	**Konstruksi reklame/papan nama**	
1352	Sedang	0,70	229*	Papan nama	1,00
1360	**Ketinggian bangunan gedung**	**0,10**			
1362	Sedang	0,70			
1370	**Kepemilikan**	**0,05**			
1373	Yayasan	0,40			
1400	**WAKTU PENGGUNAAN**				
1430	Tetap	1,00			

   b. Indeks terintegrasi bangunan gedung:

   1,00 x {(0,25 x 1,00)+(0,20 x 1,00)+(0,15 x 0,70) +(0,15 x 0,70)+ (0,10 x 0,70)+(0,10 x 0,70)+ (0,05 x0,40)} x 1,00 = **0,82**

CATATAN : Lampiran d ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur/Bupati/ Walikota Nomor :.....tanggal..... tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung

2. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung:

1000	Bangunan gedung	L m^2 x **0,82*** x **1,00**** x HS retribusi***	Rp.....
2000	Prasarana Bangunan Gedung		
221.*	Turap	p m' x **1,00****x HS retribusi***.....	Rp.....
222.*	Gerbang	l_1 m^2 x **1,00****x HS retribusi***.....	Rp.....
223.*	Parkir dan jalan	l_2 m^2 x **1,00****x HS retribusi***.....	Rp.....
224.*	*Box culvert*	l_3 m^2 x **1,00****x HS retribusi***.....	Rp.....
225.*	*Waste water treatment plant*	l_4 m^2 x **1,00****x HS retribusi***.....	Rp.....
226.*	*Water tower*	n unit x **1,00****x HS retribusi***.....	Rp.....
229.*	Papan nama (berupa tembok pagar atau berdiri sendiri)	n unit x **1,00****x HS retribusi***.....	Rp.....

b. Retribusi penyediaan formulir ..... Rp..... +

Jumlah ..... Rp.....

(Terbilang : .....)

---

*) Nomor indeks sesuai dengan nomor daftar indeks yang ditetapkan oleh Pemda.

**) Indeks untuk pembangunan baru = 1,00

***) Harga satuan retribusi sesuai dengan harga satuan yang ditetapkan oleh Pemda.

.....,.....2007

KEPALA BIDANG ..... KEPALA SEKSI .....

NIP.:..... NIP.:.....

CATATAN : Lampiran d ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur/Bupati/ Walikota Nomor :.....tanggal..... tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung

Bagian - K

SURAT PERNYATAAN PEMILIK BANGUNAN GEDUNG AKAN MELAKSANAKAN KONSTRUKSI DENGAN BERPEDOMAN PADA PERSYARATAN POKOK TAHAN GEMPA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Nomor KTP/SIM/Paspor : .....

Nomor IMB : .....

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Adalah benar bahwa saya adalah pemilik bangunan gedung sesuai keterangan di dalam dokumen IMB.
2. Saya akan melaksanakan konstruksi bangunan gedung sesuai dengan dokumen rencana teknis yang telah disahkan.
3. Saya akan melaksanakan konstruksi bangunan gedung dengan berpedoman pada persyaratan pokok tahan gempa.
4. Saya bersedia bila pengkaji teknis dari DPMPTSP melakukan pengkajian teknis atas bangunan gedung milik saya pada saat pelaksanaan dan paska konstruksi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga.

....., ... 2017

Pemilik Bangunan Gedung,

(.....)

Bagian – L

SURAT PERNYATAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI YANG TERSISA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....
No. KTP/SIM/Paspor : .....
No. Permohonan IMB : .....

Selaku pemilik bangunan gedung :

Alamat : .....
Kampung/Kelurahan : .....
Distrik : .....
Status Kepemilikan Tanah : .....
Nomor Bukti Kepemilikan : .....
Nama Pemilik Tanah :.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya bertanggungjawab penuh terhadap pembangunan pondasi dan bangunan yang berdiri.
2. Saya mengetahui bahwa setelah saya memperoleh IMB Pondasi, maka saya memiliki kewajiban membayar retribusi IMB Pondasi berdasarkan sebagian nilai retribusi yang dihitung sementara oleh pemerintah daerah.
3. Saya akan membayar nilai retribusi IMB tersisa sesuai perhitungan terakhirpaling lambat 1 bulan setelah penerbitan dan pemberitahuan penetapan nilai retribusi terbaru (Surat Keterangan Retribusi Daerah) yang disampaikan kepada saya.
4. Jika saya tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan, maka saya bersedia dikenakan sanksi:

a. Membayar denda sebesar 10% dari total nilai retribusi IMB yang ditetapkan.
b. Mengurus kembali IMB dengan prosedur dan persyaratan awal, setelah masa berlaku pembayaran retribusi IMB telah habis (1 bulan).
c. Dimasukan ke daftar hitam pemohon IMB untuk jangka waktu 1 tahun.

....., ... 2017

Yang menyatakan,

(.....)

Bagian - M

KOMPONEN RETRIBUSI SERTA RUMUS DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI

M.1. KOMPONEN RETRIBUSI

M.2. RUMUS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI

M.3. INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG

M.4. INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN PRASARANA

M.1. KOMPONEN RETRIBUSI

NO.	JENIS RETRIBUSI	PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1.	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung	
	a. Bangunan Gedung	
	1) Pembangunan bangunan gedung baru	Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 1,00 x HS retribusi
	2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan.	
	a) Rusak Sedang	Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,45 x HS retribusi
	b) Rusak Berat	Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,65 x HS retribusi
	3) Pelestarian/pemugaran	
	a) Pratama	Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,65 x HS retribusi
	b) Madya	Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,45 x HS retribusi
	c) Utama	Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,30 x HS retribusi
	b. Prasarana Bangunan Gedung	
	1) Pembangunan baru	Volume x Indeks ')x 1,00 x HS retribusi
	2) Rehabilitasi	
	a) Rusak Sedang	Volume x Indeks *)x 0,45 x HS retribusi
	b) Rusak Berat	Volume x Indeks x 0,65 x HS retribusi
2.	Retribusi administrasi IMB	Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan proses
3.	Retribusi penyediaan formulir PIMB termasuk pendaftaran bangunan gedung	Ditetapkan sesuai dengan jumlah biaya pengadaaan/ pencetakan formulir per-set

M.2. RUMUS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI

1. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru : $L \times I_t \times 1{,}00 \times HS_{bg}$
2. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung : $L \times I_t \times Tk \times HS_{bg}$
3. Retribusi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times 1{,}00 \times HS_{pbg}$
4. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times Tk \times HS_{pbg}$

Keterangan :

L = Luas lantai bangunan gedung

V = Volume/besaran (dalam satuan m2, m', unit)

I = Indeks

It = Indeks terintegrasi

Tk = Tingkat kerusakan 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 0,65 untuk tingkat kerusakan berat

HSbg = Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif setiap kabupaten/kota)

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

1,00 = Indeks pembangunan baru

M.3. INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG

FUNGSI		**KLASIFIKASI**				**WAKTU PENGGUNAAN**	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05 /0,5*)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00 /1,00**)	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00			b. Semi permanen	0,70		
6. Ganda/ Campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
		3. Risiko kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi gempa	0,15	a. Zona I / minor	0,10		
				b. Zona II / minor	0,20		
				c. Zona III / sedang	0,40		
				d. Zona IV / sedang	0,50		
				e. Zona V / kuat	0,70		
				f. Zona VI / kuat	1,00		
		5. Lokasi(kepadatan bangunan gedung)	0,10	a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
		6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		7. Kepemilikan	0.05	a. Negara/Yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan usaha swasta	1,00		

CATATAN :

*) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.

**) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.

Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah *(basement)*, di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

M.4. INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN PRASARANA

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	ƒ
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	a. Pagar b. Tanggul / *retaining wall* c. Turap batas kavling/persil	1,00	0,65	0,45	0,00
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00
3.	Konstruksi perkerasan	a. Jalan b. Lapangan upacara c. Lapangan olah raga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00
4.	Konstruksi penghubung	a . Jembatan b . *Box culvert*	1,00	0,65	0,45	0,00
5.	Konstruksi kolam/*reservoir* bawah tanah	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air *Reservoir* di bawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00
6.	Konstruksi menara	a. Menara antena b. Menara *reservoir* c. Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00
7.	Konstruksi monumen	a . Tugu b . Patung	1,00	0,65	0,45	0,00
8.	Konstruksi instalasi / gardu	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon/ komunikasi c. Instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00
9.	Konstruksi reklame/ papan nama	a. *Billboard* Papan iklan b. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00

CATATAN :

1. *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
2. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

BUPATI FAKFAK,

CAP/TTD

MOHAMMAD USWANAS

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGUSTHINUS RIRUMA, SH
NIP. 19611211 198908 1 002

:

ɛks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor k Negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.

konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah ɔ.

BUPATI FAKFAK,

CAP/TTD

MOHAMMAD USWANAS

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGUSTHINUS RIRUMA, SH
NIP. 19611211 198908 1 002

Lampiran II : Peraturan Bupati Fakfak
Nomor 28 Tahun 2017
Tanggal 31 Agustus 2017

KELENGKAPAN PENYELENGGARAAN TABG

Bagian - A	BERKAS UNDANGAN
Bagian - B	FORMAT NASKAH KODE ETIK TABG
Bagian - C	FORMAT SURAT PERMOHONAN USULAN NAMA CALON ANGGOTA TABG UNSUR DINAS PUPR2KP DAN INSTANSI TEKNIS TERKAIT
Bagian - D	FORMAT SURAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TABG
Bagian - E	FORMAT UNDANGAN CALON TABG
Bagian - F	FORMAT SURAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA TABG
Bagian - G	FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR2KP TENTANG PENUGASAN RUTIN TAHUNAN ANGGOTA TABG
Bagian - H	FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR2KP TENTANG PENUGASAN INSIDENTAL ANGGOTA TABG
Bagian - I	DAFTAR SIMAK PENGKAJIAN PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS
Bagian - J	FORMAT JADWAL SIDANG TABG
Bagian - K	FORMAT SANKSI TEGURAN BAGI ANGGOTA TABG
Bagian - L	FORMAT SANKSI PERINGATAN BAGI ANGGOTA TABG
Bagian - M	FORMAT SANKSI PEMBERHENTIAN BAGI ANGGOTA TABG
Bagian - N	FORMAT SANKSI PEMBERHENTIAN DAN DIKELUARKAN DARI BASIS DATA BAGI ANGGOTA TABG
Bagian - O	FORMAT BASIS DATA AHLI BANGUNAN GEDUNG

Bagian - A

BERKAS UNDANGAN

A. 1 FORMAT SURAT UNDANGAN SEBAGAI NARASUMBER KEPADA TABG KABUPATEN/KOTA LAIN DI INDONESIA

BUPATI FAKFAK

……,……

Nomor :

Lampiran :

Kepada Yth.

(undangan terlampir)

di-

tempat

Perihal : Permohonan menjadi narasumber Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/Kota……

Sehubungan akan diselenggarakannya sidang TABG bangunan gedung untuk kepentingan umum dengan fungsi bangunan……di Kabupaten/Kota……, maka dengan ini kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi narasumber pada sidang tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal :

Tempat :

Waktu :

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian, dukungan dan kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

……,……

BUPATI FAKFAK,

……

Tembusan disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak di Fakfak;
2. Kepala BP4D Kabupaten Fakfak di Fakfak ;
3. Kepala Dinas PUPR2KP Kabupaten Fakfak di Fakfak.

A.2 FORMAT SURAT UNDANGAN PEREKRUTAN KEPADA TABG KABUPATEN/KOTA LAIN DI INDONESIA

BUPATI FAKFAK

……,……

Nomor :

Lampiran :

Kepada

Yth. Bupati/Walikota……

di……

Perihal : Perekrutan Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/Kota……

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota……. Nomor…… Tahun…… tentang Bangunan Gedung, dengan ini menyampaikan kebutuhan Tim Ahli Bangunan Gedung yang dibutuhkan dari basis data Kabupaten/Kota……., serta memenuhi syarat untuk menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/Kota……Tahun……melalui proses pembentukan yang diselenggarakan oleh Panitia yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati/Walikota Nomor…… tanggal……

Adapun penjelasan, persyaratan, dan ahli bangunan yang dibutuhkan adalah sebagaimana pada lampiran surat ini :

1. Dokumen Penjelasan terdiri dari :
   a. Leaflet Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

b. Persyaratan Calon Anggota TABG sesuai dengan persyaratan teknis keprofesian/kepakaran TABG.

2. Daftar kebutuhan TABG Kabupaten/Kota.....

3. Pengisian formulir terdiri dari :

a. Formulir Surat Permohonan untuk menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.

b. Formulir Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*).

4. Mendaftar dan memasukkan Dokumen Pendaftaran.

5. Mengikuti proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung.

Jadwal kegiatan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1.	(tanggal)	-	(tanggal)	Penyampaian Surat Dokumen Pendaftaran oleh Panitia
2.	.....	-	.....	Pendaftaran dan pemasukan Dokumen Pendaftaran
3.	.....	-	.....	Proses penilaian oleh Panitia.
4.	.....	-	.....	Penetapan nama-nama anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.

Penjelasan lebih lanjut dapat diperoleh di:

SEKRETARIAT PANITIA PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

KABUPATEN/KOTA.....

Jl.....

(Kabupaten/Kota).....

Telepon.....

Penyampaian usulan nama-nama agar selambat-lambatnya kami terima pada tanggal.....melalui sekretariat Panitia tersebut di atas.

Demikian agar yang berminat dapat mengikuti

....,.....

BUPATI FAKFAK,

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak di Fakfak;
2. Kepala BP4D Kabupaten Fakfak di Fakfak ;
3. Kepala Dinas PUPR2KP Kabupaten Fakfak di Fakfak.

Lampiran 2

Surat Bupati Fakfak

Nomor:.....tanggal.....

DAFTAR KEBUTUHAN TABG KABUPATEN/KOTA.....

TAHUN ANGGARAN.....

NO	UNSUR TABG	BIDANG KEAHLIAN DAN PENGALAMAN KERJA	PENDIDIKAN TERAKHIR

Lampiran 3.a

Surat Bupati Fakfak

Nomor:.....tanggal.....

SURAT PERMOHONAN

UNTUK MENJADI

ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat dan tanggal lahir :

Alamat rumah :

mewakili unsur (beri tanda ✓ :

1. Perguruan Tinggi ☐
2. Asosiasi profesi ☐
3. Masyarakat ahli ☐
4. Masyarakat adat ☐

Menyatakan memiliki keahlian di bidang (besi tanda ✓):

1. Arsitektur bangunan gedung ☐
2. Struktur dan konstruksi ☐
3. Utilitas (mekanikal dan elektrikal) ☐
4. Planologi/perencanaan wilayah dan kota ☐
5. Pertamanan/Lanskap ☐
6. Tata ruang-dalam/interior ☐
7. Bangunan gedung adat ☐
8. Nuklir ☐
9. Teknologi informasi ☐
10. .....

dengan ini memohon untuk menjadi anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/Kota.....

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan, saya melampirkan dokumen-dokumen sesuai dengan persyaratan administratif sebagai berikut:

1. Surat Permohonan untuk menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.
2. Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*).
3. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP).
4. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir.

5. Surat Penugasan Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dan/atau pejabat lainnya yang terkait (khusus bagi Pejabat Fungsional dan/atau pejabat lainnya yang terkait).
6. Fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) perseorangan.
7. Surat keterangan domisili.
8. Surat keterangan sehat.
9. Surat keterangan bebas narkoba.
10. Pasfoto 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Setuju untuk mengikuti proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/Kota……Tahun…….
2. Bersedia diangkat menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung apabila telah lulus dan terdaftar dalam Daftar Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.

……,……

(Materai tempel Rp. 6.000,-)

_____

(Nama lengkap)

Lampiran 3.b

Surat Bupati Fakfak

Nomor:.....tanggal.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

(*Curriculum Vitae)*

---

1. UMUM
(Pengisian wajib menggunakan hurup cetak)

Nama	:
Tempat tanggal lahir	:
Alamat rumah	:
Nomor Telepon Rumah/ HP	:
Nomor fax	:
e-mail	:
pendidikan terakhir	:

---

2. PENGALAMAN KERJA
(Tuliskan nama instansi/ perusahaan, jabatan, lama bekerja atau dari tahun berapa ke tahun berapa, dan uraian singkat tentang tugas/ fungsi dan tanggung jawab).
1.

Pasfoto ukuran 3 cm x 4 cm .....,.....

(Nama lengkap)

CATATAN: Apabila halaman ini tidak cukup, dapat menambahkan di lembar tambahan

Lembar tambahan untuk Pengalaman KERJA

Bagian - B

FORMAT NASKAH KODE ETIK TABG

SURAT KEPUTUSAN .....

Nomor:.....

Tentang

KODE ETIK TABG

Menyadari profesi yang luhur, TABG dalam melaksanakan tugas untuk terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, andal, dan efisien, serta sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat, dengan dituntun hati nurani yang dalam, anggota tim ahli bangunan gedung berjanji:

1. Melaksanakan tugas secara profesional dengan keilmuan yang didasari ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial, budaya, dan ekonomi serta menghargai kearifan lokal;
2. Melaksanakan tugas secara independen, objektif, dan tanpa terdapat konflik kepentingan; dan
3. Melayani masyarakat senantiasa terbuka dan mempertanggungjawabkan hasil kerja.

Ditetapkan di.....
Tanggal.....

Ketua :.....
Wakil Ketua:.....
Sekretaris :.....
Anggota :.....

TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

Ttd

.....
Ketua

Ttd

.....
Sekretaris

Bagian - C

FORMAT SURAT PERMOHONAN USULAN NAMA CALON ANGGOTA TABG
UNSUR DINAS PUPR DAN INSTANSI TEKNIS TERKAIT

BUPATI FAKFAK

.....,.....

Nomor:

Lampiran :

Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas.....
2. Kepala Dinas.....
3. .....(instansi terkait lainnya)

di.....

Perihal : Usulan pejabat untuk duduk sebagai Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Fakfak Tahun.....

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung, dengan ini kami minta kepada Saudara untuk duduk atau menugaskan pejabat dari instansi Saudara/ Dinas.....sebagai anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Fakfak Tahun.....

Penyampaian usulan pejabat agar selambat-lambatnya kami terima pada tanggal.....melalui Sekretariat Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Fakfak, dengan alamat :.....

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

BUPATI FAKFAK,

.....

Tembusan kepada Yth.:

1. .....
2. .....

Bagian - D

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI FAKFAK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TABG

BUPATI FAKFAK

PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI FAKFAK

NOMOR ……./ …. / TAHUN …….

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN FAKFAK TAHUN……

BUPATI FAKFAK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung, untuk membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung, diperlukan adanya Tim Ahli Bangunan Gedung;

b. bahwa untuk membentuk Tim Ahli Bangunan Gedung perlu diadakan proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung yang terbuka bagi masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Fakfak ;

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung tersebut dalam huruf b, perlu dibentuk Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung;

d. bahwa nama-nama pejabat yang tertera pada Kolom 2 Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat sebagai Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung;

e. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, b, c, dan d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532)
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 013);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 014);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak .....;
9. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 056);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Fakfak yang terdiri atas Pengarah, Pelaksana, serta Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pengarah bertugas memberikan arahan dan pedoman pelaksanaan proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung;

KETIGA : Pelaksana bertugas melakukan penyiapan persyaratan, materi, dan proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung, hingga tersusunnya Daftar Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung ;

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Pelaksana dibantu oleh Sekretariat untuk tugas-tugas baik berupa dukungan administratif maupun kelengkapannya;

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran ..... melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPA-SKPD) Dinas PUPR2KP Kabupaten Fakfak;

KEENAM : Masa tugas Tim dinyatakan berakhir setelah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditetapkan yaitu setelah Daftar Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung tersusun sebagai Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Fakfak Tahun.....

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal .....

BUPATI FAKFAK,

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak di Fakfak;
2. Kepala BP4D Kabupaten Fakfak di Fakfak;
3. Kepala Dinas PUPR2KP Kabupaten Fakfak di Fakfak
4. Para Anggota Panitia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Fakfak

Nomor .....

Tanggal .....

PANITIA PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN FAKFAK TAHUN .....

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
I.	PENGARAH		
1.			Ketua merangkap anggota
2.			Wakil ketua merangkap anggota
3.			Anggota
II.	PELAKSANA		
1.			Ketua merangkap anggota
2.			Wakil ketua merangkap anggota
3.			Anggota
4.			Anggota
5.			Anggota
III.	SEKRETARIAT		
1.			Ketua merangkap anggota
2.			Wakil ketua merangkap anggota
3.			Anggota
4.			Anggota
5.			Anggota

BUPATI FAKFAK,

.....

Bagian - E

FORMAT UNDANGAN CALON TABG

BUPATI FAKFAK

.....,.....

Nomor:

Lampiran :

Kepada

Yth. Asosiasi Profesi/Perguruan Tinggi/

Masyarakat Ahli/Masyarakat Adat

.....(nama lembaga).....

di.....

Perihal : Usulan nama untuk pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Fakfak Tahun.....

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung, dengan ini diberikan kesempatan kepada masyarakat meliputi anggota asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli, termasuk masyarakat adat, yang memenuhi syarat untuk menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Fakfak Tahun..... melalui proses pembentukan yang diselenggarakan oleh Panitia yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Fakfak Nomor..... tanggal.....

Adapun penjelasan, dan persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagaimana pada lampiran surat ini :

1. Dokumen Penjelasan terdiri dari :

   a. Leaflet Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

b. Persyaratan Calon Anggota TABG sesuai dengan persyaratan teknis keprofesian/kepakaran TABG.

2. Pengisian formulir terdiri dari :

a. Formulir Surat Permohonan untuk menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.

b. Formulir Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*).

3. Mendaftar dan memasukkan Dokumen Pendaftaran.

4. Mengikuti proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung.

Jadwal kegiatan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1.	(tanggal)	-	(tanggal)	Penyampaian Surat Dokuemn Pendaftaran pleh Panitia
2.	.....	-	.....	Pendaftaran dan pemasukan Dokumen Pendaftaran
3.	.....	-	.....	Proses penilaian oleh Panitia.
4.	.....	-	.....	Penetapan nama-nama anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.

Penjelasan lebih lanjut dapat diperoleh di:

SEKRETARIAT PANITIA PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN/ KOTA.....
Jl.....
(Kota).....
Telepon.....

Penyampaian usulan nama-nama agar selambat-lambatnya kami terima pada tanggal.....melalui sekretariat Panitia tersebut di atas.

Demikian agar masyarakat yang berminat dapat mengikuti

.....,.....

BUPATI FAKFAK,

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak di Fakfak;
2. Kepala BP4D Kabupaten Fakfak di Fakfak;
3. Kepala Dinas PUPR2KP Kabupaten Fakfak di Fakfak

Lampiran 2.a

Surat Bupati Fakfak

Nomor:.....tanggal.....

SURAT PERMOHONAN

UNTUK MENJADI

ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat dan tanggal lahir :

Alamat rumah :

mewakili unsur (beri tanda ✓ :

1. Perguruan Tinggi ☐
2. Asosiasi profesi ☐
3. Masyarakat ahli ☐
4. Masyarakat adat ☐

Menyatakan memiliki keahlian di bidang (besi tanda ✓):

1. Arsitektur bangunan gedung ☐
2. Struktur dan konstruksi ☐
3. Utilitas (Mekanikal dan elektrikal) ☐
4. Planologi/perencanaan wilayah dan kota ☐
5. Pertamanan/Lanskap ☐
6. Tata ruang-dalam/interior ☐
7. Bangunan gedung adat ☐
8. Nuklir ☐
9. Teknologi informasi ☐
10. .....

dengan ini memohon untuk menjadi anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/Kota.....

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan, saya melampirkan dokumen-dokumen sesuai dengan persyaratan administratif sebagai berikut:

1. Surat Permohonan untuk menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.
2. Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*).
3. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP).
4. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir.

5. Surat Penugasan Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dan/atau pejabat lainnya yang terkait (khusus bagi Pejabat Fungsional dan/atau pejabat lainnya yang terkait).
6. Fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) perseorangan.
7. Surat keterangan domisili.
8. Surat keterangan sehat.
9. Surat keterangan bebas narkoba.
10. Pasfoto 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Setuju untuk mengikuti proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/Kota……Tahun…….
2. Bersedia diangkat menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung apabila telah lulus dan terdaftar dalam Daftar Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.

……,……

(Materai tempel Rp. 6.000,-)

_____

(Nama lengkap)

Lampiran 2.b.

Surat Bupati Fakfak

Nomor:.....tanggal.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

(*Curriculum Vitae)*

1. UMUM
(Pengisian wajib menggunakan hurup cetak)

Nama	:
Tempat tanggal lahir	:
Alamat rumah	:
Nomor Telepon Rumah/ HP	:
Nomor fax	:
e-mail	:
pendidikan terakhir	:

2. PENGALAMAN KERJA
(Tuliskan nama instansi/ perusahaan, jabatan, lama bekerja atau dari tahun berapa ke tahun berapa, dan uraian singkat tentang tugas/ fungsi dan tanggung jawab).
1.

Pasfoto ukuran 3 cm x 4 cm .....,.....

(Nama lengkap)

CATATAN: Apabila halaman ini tidak cukup, dapat menambahkan di lembar tambahan

Lembar tambahan untuk Pengalaman KERJA

Bagian – F

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI FAKFAK TENTANG PENETAPAN ANGGOTA TABG

BUPATI FAKFAK

PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI FAKFAK

NOMOR ……./……./ TAHUN ……

TENTANG

PENETAPAN NAMA ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

KABUPATEN FAKFAK TAHUN……

BUPATI FAKFAK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung untuk terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, berjatidiri, seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan, serta diselenggarakan secara tertib dan berkepastian hukum;

b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 158 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung, telah diadakan proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur-unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli termasuk masyarakat adat serta unsur Dinas PUPR2KP dan Instansi Teknis Terkait;

c. bahwa nama-nama yang tertera pada Kolom 2 Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat sebagai Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung;

d. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, b, c, dan d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532)
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 013);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 014);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak .....;

10. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 056);

11. Peraturan Bupati Fakfak Nomor ..... Tahun..... tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas.....(instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung).

Memperhatikan:

1. Surat asosiasi profesi.....Nomor : ..... tanggal.....tentang Usulan nama-nama calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun.....
2. Surat dari perguruan tinggi.....Nomor :..... .....tanggal.....tentang Usulan nama calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun.....
3. Surat dari masyarakat ahli.....Nomor :..... tanggal.....tentang usulan nama-nama calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun.....
4. Surat dari masyarakat adat.....Nomor : ....tanggal.....tentang Usulan nama-nama calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun.....
5. Surat dari instansi.....Nomor : .... tanggal.....tentang Usulan nama-nama calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun.....
6. Hasil penilaian Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/Kota.....Nomor :..... tanggal.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Fakfak Tahun ..... dengan susunan dan nama-nama sebagaimana tertera pada Kolom 2, dengan bidang keahliannya sebagaimana tersebut pada Kolom 5 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Nama-nama tersebut pada Kolom 2 dapat gugur dan dihapus dari *Database* Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk gugur sesuai dengan ketentuan.

KEEMPAT : Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung yang ditugaskan serta diangkat/dilantik untuk melaksanakan tugas diberikan honorarium dan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran ..... melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas.....(instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung).

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal .....

BUPATI FAKFAK,

.....

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak di Fakfak;
2. Kepala BP4D Kabupaten Fakfak di Fakfak;
3. Kepala Dinas PUPR2KP Kabupaten Fakfak di Fakfak
4. Para Calon Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung terseleksi.